

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pengangguran di Indonesia

Cut Elsa Fahira ^a, Devia Chalisa ^b, Nurul Karila ^c, Muammar Rezaldi ^d, Rezky Wulan Ramadhani ^e, Khairul Amri ^{f*}

^{a,b,c,d,e,f*} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of capital expenditure on the unemployment rate in Indonesia. Using panel data from 30 provinces during the 2007-2015 period. To sharpen the analysis, we divided the provinces into three groups, namely the western region, the central region, and the eastern region. The analysis model used is panel regression with a fixed effect approach. Using 95% confidence, our research provides empirical evidence that capital expenditure can significantly reduce the unemployment rate in Indonesia's western and central regions, whereas for the eastern region, this expenditure does not significantly reduce unemployment.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja modal terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Menggunakan data panel 30 provinsi selama periode 2007-2015. Guna mempertajam analisis, kami membagi provinsi dalam tiga kelompok yakni kawasan barat, kawasan tengah dan kawasan timur. Model analisis yang digunakan adalah regresi panel pendekatan fixed effect. Menggunakan keyakinan 95%, penelitian kami memberikan bukti empiris bahwa belanja modal secara signifikan dapat menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia Kawasan barat dan tengah, sebaliknya untuk daerah Kawasan timur, belanja ini tidak signifikan menurunkan pengangguran.

ARTICLE HISTORY

Received 11 March 2023

Accepted 25 April 2023

Published 30 May 2023

KEYWORDS

Unemployment Rate; Capital Expenditure; Panel Regression Fixed Effect Approach.

KATA KUNCI

Tingkat Pengangguran; Belanja Modal; Regresi Panel Pendekatan Fixed Effect.

1. Pendahuluan

Hasil kajian sejumlah peneliti berkaitan dengan pengangguran yang tidak berbanding positif apa yang dilakukan oleh Provinsi. Akhmad (2019) dalam penelitiannya dapat disimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh positif namun tidak nyata terhadap angka. Hal ini yang menyebabkan sehingga belanja modal berpengaruh positif atau berbanding lurus dengan angka pengangguran. Sebaliknya, berbeda dengan peneliti tersebut, penelitian yang dilakukan Sondakh & Lapian (2017) menemukan bahwa hasil alokasi belanja yang dianggarkan pemerintah melalui alokasi belanja modal, dimana belanja ini untuk menggenjot pembangunan serta investasi swasta baik dalam negeri maupun asing mempunyai korelasi atau hubungan saling keterkaitan satu sama lain dengan kesempatan kerja yang ada di dimana berdasarkan hasil penghitungan didapatkan hasil bahwa semakin tinggi tingkat alokasi belanja modal yang dianggarkan dan semakin banyak ketertarikan investasi dari dalam maupun luar negeri akan semakin mengurangi jumlah pengangguran. Meskipun dalam penelitian ini korelasi yang terjadi masih kecil namun dengan semakin besarnya pengalokasian anggaran pembangunan yang diberikan oleh pemerintah dan semakin terbukanya sumber-sumber ekonomi potensial maka akan meningkatkan pula minat dari para pemegang modal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri untuk dapat menanamkan investasinya.

Berbeda dengan sejumlah peneliti, kajian ini menggunakan data panel provinsi di

Indonesia dengan membagi wilayah dalam tiga Kawasan (barat, tengah dan timur). Menggunakan regresi panel pendekatan *Fixed Effect*, temuan penelitian dapat menggambarkan sejauhmana realisasi belanja modal dapat mendorong penurunan tingkat pengangguran di masing-masing Kawasan.

Pengangguran merupakan salah satu keadaan dimana seseorang belum dapat memperoleh pekerjaan tetapi ingin mendapatkan pekerjaan dan tergolong dalam angkatan kerja (Sukirno, 2000). Pengangguran merupakan salah satu masalah makroekonomi yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia secara langsung yang dapat mengakibatkan menurunnya standar kehidupan dan juga tekanan secara psikologis dan juga masalah yang sangat sulit dalam mengatasinya di setiap negara. Pengangguran juga merupakan salah satu hal yang sangat sering di bicarakan dalam debat politik, dan politisi menawarkan kebijakan-kebijakan yang mereka yakini dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan dan sekaligus dapat mengurangi pengangguran (Mankiw, 2003).

Dalam suatu negara, pengangguran dapat diartikan sebagai perbedaan di antara penggunaan tenaga kerja dan angkatan kerja yang sebenarnya. *International Labor Organization* (ILO) membagi penduduk menjadi dua, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Lebih lanjut penduduk usia kerja memiliki dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Dalam menganalisis kinerja perekonomian suatu negara atau suatu daerah, maka salah satu indikator yang menjadi tolak ukur adalah bagaimana penggunaan sumber daya yang ada, terutama penggunaan tenaga kerja. Oleh karena itu salah satu titik fokus analisis adalah ketersediaan lapangan kerja. Karena itu pemerintah senantiasa dihadapkan pada kebijakan dalam hal penciptaan lapangan kerja. Mengingat pertumbuhan penduduk di negara-negara berkembang cukup tinggi, yang dapat menyebabkan terus meningkatnya jumlah pekerja dan pengangguran seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk.

Pada dasarnya pengangguran dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang berbanding terbalik. Dikatakan demikian karena orang yang bekerja tentu akan memberi kontribusi dalam memproduksi barang dan jasa. Sementara orang yang menganggur (tidak bekerja) otomatis tidak berkontribusi terhadap penciptaan barang dan jasa. Salah satu pakar ekonomi yang melakukan kajian tentang hubungan antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yaitu Arthur Okun melakukan identifikasi hubungan antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Artur Okun menemukan bahwa semakin banyak angka pengangguran maka semakin rendah pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya beberapa pakar ekonomi mencoba menguji teori dari Arthur Okun tersebut, antara lain dilakukan oleh Silvapulle *et al.*, (2004) Attfield & Silverstone (1998), Harris & Silverstone (2001), Sogner & Alfred (2002), Apergi & Rezitis(2003), dalam melihat pola hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Temuan mereka bervariasi secara substansial dari waktu ke waktu antara negara.

Pengangguran merupakan keadaan dimana tenaga kerja yang mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan tetapi terdapat penghalang sehingga tidak mendapatkan pekerjaan tersebut dengan tingkat upah yang berlaku. Penyebab terjadinya pengangguran pada umumnya yaitu tidak sebandingnya jumlah angkatan kerja dengan lapangan kerja yang tersedia. Pengangguran juga menjadi salah satu masalah dalam perekonomian suatu Negara, karena dapat menyebabkan berkurangnya produktivitas dan pendapatan masyarakat sehingga menimbulkan masalah kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan masalah sosial lainnya (Mada & Anshar, 2015). Pengangguran juga di sebabkan oleh ketidakseimbangan pasar tenaga kerja. Kondisi dimana jumlah penawaran tenaga kerja melebihi jumlah permintaan tenaga kerja (Dongoran *et al.*, 2016).

Hubungan pertumbuhan ekonomi dan pengangguran bersifat positif dan negatif. Pertumbuhan ekonomi melalui GDP yang bersifat positif dikarenakan pertumbuhan

ekonomi tidak dibarengi oleh peningkatan kapasitas produksi, sehingga pengangguran tetap meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat ini berorientasi pada padat modal, di mana kegiatan produksi untuk memacu output dan menghasilkan pendapatan yang meningkat lebih diutamakan ketimbang pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada padat karya.

Melebarnya ketimpangan pendapatan antara yang kaya dengan yang miskin merupakan salah satu masalah global. Dimana penyebab utama kemiskinan yaitu kurangnya pendidikan. Pendidikan dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan cara meningkatkan kemampuan, keterampilan dan pengetahuan orang miskin, sehingga mendapatkan penghasilan yang dapat menurunkan ketimpangan. Pendidikan mempunyai kontribusi yang sangat penting dalam meningkatkan sumber daya manusia dan produktifitas suatu Negara. Dengan meningkatnya produktifitas tenaga kerja, maka akan meningkatkan output (Abrigo *et al.*, 2017).

Pengalokasian anggaran daerah dalam bentuk belanja modal terutama pembangunan infrastruktur misalnya, akan berdampak positif pada penyediaan lapangan kerja terutama pada saat pembangunan, yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat pengangguran (Zulhanafi *et al.*, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Bahri *et al.* (2019) juga membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pengangguran di Indonesia. Belanja pemerintah dapat mendorong penciptaan lapangan kerja yang kemudian menyerap sejumlah angkatan kerja. Sebelumnya, penelitian Muammil (2018), apabila pengeluaran pemerintah di tingkatkan (ekspansi fiskal), hal tersebut dapat meningkatkan peluang kerja. Akan tetapi, cukup besar pengeluaran pemerintah dari segi pembangunan infrastruktur yang mana belum mampu menekan tingkat pengangguran. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Abrigo *et al.* (2017) menunjukkan bahwa investasi modal manusia memiliki efek positif pada produktivitas tenaga kerja. Investasi tersebut dapat menghasilkan pendapatan pajak yang cukup untuk meningkatkan keseimbangan fiskal. Tingkat pengangguran yang berkurang meningkatkan pembangunan manusia dan akibatnya mengurangi kemiskinan. Belanja modal publik naik, pengangguran turun dan indeks pembangunan manusia membaik. Karena itu, kebijakan berbasis infrastruktur, yang pada awalnya mengurangi pengangguran, juga akan meningkatkan taraf hidup (Akinbobola & Saibu, 2004).

Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Selase (2019) di negara-negara Afrika dengan data panel mulai tahun 2000-2017 menunjukkan bahwa pengeluaran untuk infrastruktur dan pendidikan mengurangi tingkat pengangguran sementara pengeluaran untuk pertahanan kesehatan meningkatkan tingkat pengangguran di wilayah tersebut. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Amri (2010), peningkatan infrastruktur jalan tidak memiliki hubungan jangka panjang terhadap perkembangan kesempatan kerja. Akan tetapi kesempatan kerja pada tahun tertentu secara positif dan signifikan dipengaruhi oleh kesempatan kerja tahun sebelumnya. Muliadi & Amri (2019) juga mengemukakan bahwa Infrastruktur jalan dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap terciptanya lapangan kerja di Aceh. Begitu juga dengan penelitian yang di lakukan oleh Abubakar (2016) pengeluaran publik memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan output, tetapi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengangguran di Nigeria. Yang mana pengeluaran publik di Nigeria mengarah ke hal-hal yang tidak produktif, hampir tidak mengarah kepada penciptaan lapangan kerja. Hasil penelitian Mahdavi & Alanis (2013) juga menunjukkan bahwa pengeluaran publik mungkin tidak berfungsi sebagai perbaikan cepat dalam kaitannya dengan UR (tingkat pengangguran). Pengalokasian dana federal untuk upah dan gaji serta bantuan dan subsidi, tetapi tidak untuk pengeluaran modal dan asuransi sosial untuk menurunkan UR (tingkat pengangguran).

Pasar tenaga kerja di Indonesia tidak hanya mengalami ketimpangan pendapatan, tetapi juga mengalami kesenjangan gender dalam partisipasi tenaga kerja perempuan.

Tingkat partisipasi angkatan kerja wanita mengalami peningkatan dari tahun 2005 sebanyak 48% menjadi 51% pada tahun 2017. Akan tetapi angka tersebut tetap lebih rendah dari tingkat partisipasi angkatan kerja pria yaitu sebesar 83% (Doumbia & Kinda, 2019).

2. Metode

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang menggabungkan antara data runtun waktu (*time series*) dan data silang (*cross-section*) yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data runtun waktu mencakup data tahunan yang dimulai dari tahun 2007 – 2015, sedangkan data silang mencakup 30 provinsi yang ada di Indonesia yang terbagi menjadi 3 kawasan yaitu kawasan barat, kawasan tengah dan kawasan timur. Terdapat 10 provinsi yang termasuk kedalam kawasan barat yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Pada kawasan tengah terdapat 11 provinsi meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Sedangkan provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Papua dan juga Papua Barat termasuk kedalam kawasan timur Indonesia. Jenis data yang dikumpulkan antara lain, ketimpangan pendapatan/gini rasio, tingkat pengangguran di Indonesia dan belanja modal di seluruh provinsi Indonesia. Keterkaitan antara variabel penelitian ini harus dijelaskan dengan pengukuran masing-masing variabel. Belanja modal adalah realisasi pengeluaran daerah per kapita, dihitung dengan satuan rupiah per kapita. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio dengan ukuran satuan 0 - 1. Kemudian, pengangguran yang dilihat dari tingkat pengangguran terbuka dengan satuan persen.

Model data panel digunakan sebagai teknik analisis ekonometrik dalam penelitian ini. Data panel merupakan kombinasi dari data bertipe *cross-section* dan *time series* (yakni sejumlah variabel diobservasi atas sejumlah kategori dan dikumpulkan dalam suatu jangka waktu tertentu (Rosadi, 2012). Untuk melihat model regresi dengan data panel, ada beberapa metode yang biasa digunakan yaitu model *Common Effect*, *Fixed Effect* dan *Random Effect*.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Statistik Deskriptif

Indonesia yang memiliki 34 provinsi dan terbagi atas 3 kawasan yaitu barat, tengah dan timur, dimana masing-masing kawasan tidak hanya memiliki nilai belanja modal, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran terbuka yang berbeda-beda antara satu provinsi dengan provinsi lainnya. Tetapi juga terdapat perbedaan pada tiap provinsi yang sama dalam periode waktu yang berbeda. Ketimpangan pendapatan pada 10 provinsi di kawasan barat pada tahun 2015 terdapat beberapa provinsi yang memiliki kesamaan, seperti Bengkulu dan Lampung (0,38) yang merupakan provinsi dengan ketimpangan pendapatan tertinggi. Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan Kepulauan Riau (0,36) juga memiliki ketimpangan pendapatan yang sama. Sebaliknya ketimpangan pendapatan terendah adalah provinsi Bangka Belitung (0,28). Berbeda dengan ketimpangan pendapatan, tingkat pengangguran terbuka memiliki perbedaan antara satu provinsi dengan yang lainnya. Provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi adalah Aceh (9,93%) sedangkan yang terendah adalah provinsi Jambi (4,34%). Sama halnya dengan tingkat pengangguran, belanja modal juga relatif berbeda antara satu dengan yang lainnya. Belanja modal tertinggi pada kawasan barat

Indonesia adalah Aceh (Rp404.858,75), sedangkan Sumatera Utara (Rp66.886,05) menjadi provinsi dengan belanja modal terendah pada tahun 2015.

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

	Kawasan Barat		Kawasan Tengah		Kawasan Timur	
	Belanja Modal (Rp/Kapita)	TPT (%)	Belanja Modal (Rp/ kapita)	TPT (%)	Belanja Modal (Rp/ kapita)	TPT (%)
Mean	194.223,7	6,518	201.041,0	6,807	272.479,7	5,623
Median	152.275,5	6,330	84.103,67	5,930	137.609,3	5,100
Maximum	834.907,9	10,310	1.072.830	15,750	1.924.273	12,200
Minimum	28.104,66	2,370	8.475.873	1,790	30.066,97	2,080
Std. Dev.	141.608,0	1,829	253.988,6	3,377	356.935,5	2,359
Skewness	2,045	0,211	1,828	0,708	2,473469	0,890
Kurtosis	8,507	2,419	5,728	2,644	9,278527	3,040
Observations	90	90	99	99	81	81
Jumlah Provinsi		10		11		9

Sumber: Data Sekunder (Diolah), 2020.

Pada kawasan tengah, terdapat 6 dari 11 provinsi yang memiliki kesamaan ketimpangan pendapatan, seperti provinsi DKI dengan Yogyakarta (43%) yang juga merupakan provinsi dengan ketimpangan pendapatan tertinggi, tidak hanya itu, provinsi lain yang memiliki kesamaan yaitu Jawa Tengah dengan Bali (0,38%) dan juga Kalimantan Barat dengan Kalimantan Tenggara (0,33%). Sebaliknya, Kalimantan Timur (0,32%) adalah provinsi dengan ketimpangan pendapatan terendah. Dalam periode tahun yang sama, tingkat pengangguran memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Banten (9,55%) merupakan provinsi dengan peringkat pertama yang memiliki tingkat pengangguran tertinggi, sedangkan Bali (1,99) memegang peringkat terakhir yang memiliki tingkat pengangguran terendah dari 11 provinsi yang ada dalam kawasan tengah tersebut. Dalam hal belanja modal, DKI (Rp 1.006.496,11) menjadi provinsi dengan belanja modal tertinggi, sebaliknya Jawa Barat (Rp 49.211,75) yang memiliki belanja modal terendah.

Tidak jauh berbeda, pada kawasan timur Indonesia juga memiliki ketimpangan pendapatan yang sama pada beberapa provinsi, yaitu Sulawesi Selatan, Gorontalo dan Papua (0,42%). Akan tetapi, provinsi yang memiliki ketimpangan pendapatan tertinggi adalah Papua Barat (0,44%). Sama dengan beberapa provinsi di atas, NTT dan Maluku (0,34) juga memiliki kesamaan dan menjadi provinsi dengan tingkat ketimpangan pendapatan terendah. Berbeda dengan ketimpangan pendapatan, tingkat pengangguran terbuka berbeda-beda antar provinsi. Provinsi yang menduduki peringkat pertama tertinggi tingkat pengangguran yaitu Maluku (9,93%). Berbanding terbalik dengan Sulawesi Barat (3,35%) yang merupakan provinsi dengan tingkat pengangguran terendah. Begitu juga dengan belanja modal yang bervariasi, provinsi yang memiliki belanja modal tertinggi yaitu Papua Barat (Rp 1.924.273,18), berbeda dengan provinsi Sulawesi Selatan (Rp 99.680,18) yang merupakan provinsi dengan belanja modal terendah.

3.2 Analisis Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Pengangguran

Pengaruh belanja modal terhadap tingkat pengangguran pada kawasan barat, kawasan tengah dan, kawasan timur berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran di tiga kawasan tersebut. Hal ini dapat di lihat dari hasil koefisien estimasi pada masing-masing variabel bernilai negatif seperti yang ditunjukkan oleh rangkuman regresi panel pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Estimasi Pengaruh Belanja Modal Terhadap Tingkat Pengangguran.

		Kawasan Barat		Kawasan Tengah		Kawasan Timur	
		Dependent Variable: log TPT		Dependent Variable: logTPT		Dependent Variable: logTPT	
		Koefisien Estimasi	p-value	Koefisien Estimasi	p-value	Koefisien Estimasi	p-value
C	1.545	0,000		2,311		1,230	
	[5,069]			[11,458]	0,000	[4,217]	0,000
logBM	-0,144	0,016		-0,308		-0,101	
	[-2,458]			[-7,603]	0,000	[-1,812]	0,074
Effects Specification: Fixed Effect							
R^2		0,612		0,909		0,759	
Adjusted R^2		0,563		0,898		0,729	
F-statistic		12,452		79,342		24,905	
Prob(F-stat)		0,000		0,000		0,000	
Durbin-Watson							
stat		1,087		1,000		0,769	

Sumber: Data Sekunder (Diolah), 2020.

Note: p-value < 0,05 artinya signifikan pada keyakinan 95%; p-value > 0,05 artinya tidak signifikan pada keyakinan 95%; nilai dalam tanda [] adalah t statistik.

Dari tabel diatas dapat di artikan yang bahwa hubungan fungsional antara pengaruh belanja modal terhadap tingkat pengangguran pada kawasan barat dapat di nyatakan ke dalam persamaan 1.

$$\log TPT_{it} = 1,545 - 0,144 \log BM_{it} \quad (1)$$

Jadi pengaruh belanja modal terhadap tingkat pengangguran terbuka di kawasan barat berpengaruh negatif dan signifikan. Hal itu bisa di lihat dari hasil koefisien estimasi sebesar -0,144 (p-value = 0,000 < 0,05), bahwa setiap peningkatan belanja modal 1% dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,144% pada kawasan barat. Seperti yang diketahui apabila belanja modal yang dikeluarkan pemerintah menurun, maka akan menyebabkan perekonomian dan produktifitas masyarakatnya pun ikut menurun. Sehingga menyebabkan kesejahteraan masyarakat juga akan menurun, hal ini juga tentunya akan berpengaruh terhadap meningkatnya pengangguran yang ada dikawasan tersebut di karenakan sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan sehingga sebagian masyarakat terpaksa menjadi pengangguran.

Hasil ini selaras dengan penelitian yang di lakukan oleh Zulhanafi *et al.* (2013) yang menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah dari segi belanja modal dan infrastruktur akan berdampak pada meningkatnya output yang juga akan meningkatkan faktor-faktor produksi yang mana salah satunya adalah tenaga kerja, sehingga menurunkan tingkat pengangguran. Berbanding terbalik dengan temuan Abubakar (2016) yang menyimpulkan bahwa pengeluaran publik memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan output, tetapi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengangguran di Nigeria, dikarenakan pengeluaran publik tersebut tidak mengarah pada terciptanya lapangan kerja. Dari tabel diatas dapat di artikan yang bahwa hubungan fungsional antara pengaruh belanja modal terhadap tingkat pengangguran pada kawasan tengah dapat di nyatakan ke dalam persamaan 2.

$$\log TPT_{it} = 2,311 - 0,308 \log BM_{it} \quad (2)$$

Sama dengan hasil pengaruh belanja modal yang ada di kawasan barat, pengaruh

belanja modal dikawasan tengah juga berpengaruh negatif serta signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka dikawasan tersebut. Hal ini juga bisa kita lihat dari hasil koefisien estimasi sebesar -0,308 (p-value = 0.000 < 0,05) maka apabila meningkatnya belanja modal 1% dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,308% pada kawasan tengah.

Adanya dampak negatif dan signifikan belanja modal terhadap tingkat pengangguran terbuka sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bahri *et al.* (2019) penelitian menggunakan model *structural* itu menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pengangguran di Indonesia. Hasil tersebut memiliki sedikit perbedaan dengan temuan Selase (2019) di negara-negara Afrika dengan data panel mulai tahun 2000-2017 menunjukkan bahwa pengeluaran untuk infrastruktur dan pendidikan mengurangi tingkat pengangguran sementara pengeluaran untuk pertahanan kesehatan meningkatkan tingkat pengangguran di wilayah tersebut. Dari tabel diatas dapat di artikan yang bahwa hubungan fungsional antara pengaruh belanja modal terhadap tingkat pengangguran pada kawasan timur dapat di nyatakan ke dalam persamaan 3.

$$\log TPT_{it}=1,230-0,101\log BM_{it} \quad (3)$$

Memiliki kesamaan hasil dengan kawasan sebelumnya, kawasan timur juga memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Hal ini ditunjukkan oleh hasil estimasi koefisien sebesar -0,101 (p-value = 0.000 < 0,074). Apabila belanja modal meningkat sebesar 1%, hal ini dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,101%. Maka dapat di simpulkan bahwa belanja modal sangat berpengaruh terhadap tingkat pengangguran yang ada di kawasan barat, kawasan tengah maupun di kawasan timur, hal tersebut dapat di perhatikan dari penjelasan dari kedua kawasan di atas yang sama-sama memiliki pengaruh negatif dan signifikan antara pengaruh belanja modal terhadap tingkat pengangguran yang ada di tiga kawasan tersebut. Temuan ini selaras dengan penelitian Muammil (2018), apabila pengeluaran pemerintah di tingkatkan (ekspansi fiskal), hal tersebut dapat meningkatkan peluang kerja. Akan tetapi, cukup besar pengeluaran pemerintah dari segi pembangunan infrastruktur yang mana belum mampu menekan tingkat pengangguran. Akan tetapi bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Muliadi & Amri (2019) juga mengemukakan bahwa Infrastruktur jalan dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap terciptanya lapangan kerja di Aceh. Begitu juga dengan temuan Amri (2010), peningkatan infrastruktur jalan tidak memiliki hubungan jangka panjang terhadap perkembangan kesempatan kerja. Akan tetapi kesempatan kerja pada tahun tertentu secara positif dan signifikan dipengaruhi oleh kesempatan kerja tahun sebelumnya.

4. Kesimpulan dan Saran

Upaya pemerintah dalam mengeluarkan belanja modal tidak hanya berpengaruh dalam mengentaskan ketimpangan pendapatan di Indonesia, tetapi juga dapat mengurangi tingkat pengangguran yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini menginvestigasikan pengaruh belanja modal dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan pengangguran di semua daerah Indonesia. Menggunakan data panel 30 Provinsi di Indonesia selama periode 2007-2015. Penelitian ini menemukan bahwa pengaruh belanja modal terhadap ketimpangan pendapatan di kawasan barat berpengaruh positif dan tidak signifikan. Berbeda dengan kawasan barat, pada kawasan tengah dan timur memiliki pengaruh positif dan signifikan. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengaruh belanja modal terhadap tingkat pengangguran terbuka di kawasan barat, kawasan tengah dan kawasan timur memiliki kesamaan hasil

kajian yaitu berpengaruh negatif dan signifikan. Adapun hal ini disebabkan oleh meningkatnya belanja modal yang ada di kawasan tersebut. Jadi, semakin besar pengeluaran belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah maka pemerintah bisa menggunakan dana tersebut untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang berada di kawasan tersebut. Apabila semakin besar ketersediaan lapangan kerja yang dibuka oleh pemerintah maka akan membuat ketimpangan pendapatan dan juga pengangguran yang ada di daerah tersebut menurun.

Mengacu pada kesimpulan di atas, maka intervensi kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya ketimpangan pendapatan dan pengangguran sebagai berikut:

- 1) Ekonomi, yaitu menyediakan lapangan pekerjaan baru, agar masyarakat mengalami peningkatan dan memperbaiki pendapatan.
- 2) Sosial politik yaitu untuk meningkatkan kemakmuran keluarga, terhindar dari konflik kekerasan dan untuk mewujudkan kestabilan politik.
- 3) Pendistribusian alokasi belanja modal yang dilakukan pemerintah harus merata ke seluruh daerah di Indonesia tanpa pengecualian, sehingga tidak adanya daerah yang ketertinggalan infrastruktur dan perkembangan pembangunan lainnya, dikarenakan hal tersebut juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah.

Referensi

Abrigo, M. R. M., Lee, S. H., & Park, D. (2017). Human capital spending, inequality, and growth in middle-income Asia .*Asian Development Bank*, 529.

Abubakar, A. B. (2016). Dynamic effects of fiscal policy on output and unemployment in Nigeria: An econometrica investigation. *CBN Journal of Applied Statistics*, 7(2), 101-122.

Adnan, K., & Adnan, G. (2020). Pemberdayaan gender, pendapatan perempuan dan penurunan kemiskinan: Bukti data panel dari kawasan barat Indonesia. *Media Ekonomi*, 28(1), 37-56.

Akhmad. (2019). Pengaruh belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan investasi terhadap pengangguran di kota Makassar. 61-67.

Akinbobola, T. O., & Saibu, M. O. O. (2004). Income inequality, unemployment, and poverty in Nigeria: a vector autoregressive approach. *The Journal of Policy Reform*, 7(3), 175-183. doi:10.1080/1384128042000261800.

Alfranca, O., & Galindo, M.-A. (2003). Public expenditure, income distribution, and growth in OECD countries. *International Advances in Economic Research*, 9(2), 133-139. doi:10.1007/bf0229571.

Amri, K. (2014). Infrastruktur Transportasi dan Kepadatan Penduduk Dampaknya Terhadap Pendapatan Per Kapita: Panel Data Evidence dari Sembilan Provinsi di Sumatera, *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 2(2), 438-450.

Amri, K. (2017). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan: Data Panel 8 Provinsi di Sumatera. *Jurnal EMT KITA*, 1 (1), 1-11

Amri, K. (2018). The macroeconomic impact of regional minimum wages: A cross-province data evidence from Indonesia. *Regional Science Inquiry*, 10(3), 163-176

Amri, K. (2020). Infrastruktur jalan dan kesempatan kerja di Indonesia: pendekatan vector autoregressive. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), 85-97.

Amri, K., & Adi, A. R. (2021). Pengaruh religiusitas ke-islaman terhadap pertumbuhan ekonomi daerah: Bukti data panel kabupaten kota di Aceh, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 18(1), 29-28.

Amri, K., & Nazamuddin (2018). Is There Causality Relationship between Export and Employment: A Time Series Data Evidence from Indonesia. *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, 7(2), 86-99.

Amri, K., & Nazamuddin, BS. (2018). Is There Causality Relationship between Economic Growth and Income Inequality?: Panel Data Evidence from Indonesia. *Eurasian Journal of Economics and Finance*, 6 (2), 8-20

Amri, K., & Nazamuddin, BS. (2020). Does goods and services spendings reduce income inequality? A panel data evidence from Indonesia. *Regional Science Inquiry*, 12 (1), 87-102

Amri, K.. & Aimon, H. (2017). Pengaruh Pembentukan Modal dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Economac: Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 1(1), 1-16

Anderson, E., Jalles D'Orey, M. A., Duvendack, M., & Esposito, L. (2017). Does government spending affect income inequality? A meta-regression analysis. *Journal of Economic Surveys*, 31(4), 961-987.

Anshari, M., Azhar, Z., & Ariusni.(2018). Analisis pengaruh pendidikan, upah minimum provinsi dan belanja modal terhadap ketimpangan pendapatan di seluruh provinsi di Indonesia. *EcoGen*, 1(3), 494-502.

Apergis, N., & Rezitis, A. (2003). An examination of okun's law: evidence from regional areas in Greece. *Applied Economics*, 35, 1147-1151.

Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Attfield, C. L. F., & Silverstone, B. (1998). Okun's law, cointegration and gap variabels. *Journal of Macroeconomics*, 20(3), 625-637.

Bahri, R. S., Fatmawati, & Madris. (2019). The impact of government expenditure and investmen on unemployment in Indonesia: Analysis of demand side. *Journal Of Research In Business And Manajement*, 7(5), 40-46.

Barro, R. J. (1990). Government expenditure in a simple model of endogeneous growth. *Journal of Political Economy*, 98(5), 103-125.

Chude, N. P., & Chude, D. I. (2013). Impact of government expenditure on economic growth in Nigeria. *International Journal of Business And Management Review*, 1(4), 64-71.

Damanik, A. M., Zulganik, & Rosmeli. (2018). Factor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Dan Pembangunan Daerah*, 7(1), 15-25.

Dastidar, A. G. (2012). Income distribution and structural transformation: empirical evidence from developed and countries. *Seoul Journal of Economics*, 25(1), 25-56.

Djohan, S., Hasid, Z., & Setyadi, D. (2016). Goverment expenditure as determinants of economic growth and income inequality of inter-province of the islands in Indonesia. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 7(22), 148-158.

Dongoran, F.R., Nisa, K., Sihombing, M., & Purba, L.D. (2016). Analisis jumlah pengangguran dan ketenagakerjaan terhadap keberadaan usaha mikro kecil dan menengah di kota Medan. *Jurnal Edutech*, 2 (2), 59-72.

Doumbia, J., & Kinda, T. (2019). Allocating public spending to reduce income inequality: can it work? *International Monetary Fund*.

Dumitrescu, E.-I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non causality in heterogeneous panels, *Economic Modelling* 29, 1450-1460.

Hardanto, H., Ismail, M., & Khusaini M. (2017). Analysis of the effects of economic growth investment regional axes and capital expenditure toward the disparity in Indonesia (2007-2013). *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 9(69), 1-27.

Harris, R. & Silverstone, B., (2001). Esting for asymmetry in okun's law: a cross country comparison. *Economics Bulletin*, 5(2), 1-13.

Ishak, J. F., Alamanda, A. R., & Kusumah, R. W. R. (2018). The effect of capital expenditure and investment on income inequality. *The Accounting Journal of Binaniaga*, 3(1), 51-58.

Istiqamah & Syaparuddin. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan (Studi provinsi-provinsi di Indonesia). *Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 7(3), 111-126.

Kasipmabin, L. L., Setiawina N. D., & Purbadharma, I. B. P. (2016). Pengaruh belanja pembangunan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Udayana*, 5(5), 1233-1248.

Lopez, L., & Weber, S. (2017). Testing for Granger causality in panel data, *The Stata Journal*, 17(4), 927-984.

Mada, M., & Anshar, K. (2015). Analisis variable yang mempengaruhi jumlah pengangguran terdidik di Indonesia. *Jiep*, 15 (1), 50-76.

Mahdavi, S., & Alanis, E. (2013). Public expenditures and the unemployment rate in the American states: panel evidence. *Applied Economics*, 45(20), 2926-2937. doi:10.1080/00036846.2012.69084

Mankiw, N. G. (2003) *Makro Ekonomi*. (Fitria Liza & Imam Nurmawan, penerjemah). Jakarta: Penerbit Erlangga.

Muammil S. (2018). The effect of government expenditure and private investment on work opportunities and unemployment rate in Indonesia. *Rjoas*, 4(76). doi:10.18551/rjoas.2018.04.10.

Muliadi & Amri, K. (2019). Infrastruktur jalan, belanja modal dan kesempatan kerja: bukti data panel kabupaten kota di Aceh. *Jurnal Manajemen dan Sains*, 4(2), 334-341.

Putri, N. P. V. S., & Natha, I. K. S. (2014). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. *E-Jurnal EP Unud*, 4(1), 41-49.

Rachma, D. D., Somaji, R. P., & Kustono, A. S. (2019). Government expenditure, poverty and income inequality in Indonesia: New evidence from village funds. *Internasional Journal of Scientific & Technology Research*, 9(8), 38-42.

Republik Indonesia.2004. *Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.

Rosadi, D. (2012). *Ekonometrika dan runtut waktu terapan dengan EVviews: aplikasi untuk bidang ekonomi, bisnis dan keuangan* edisi kedua. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Sabir, Yustika, A. E., Susilo, & Maskie, G. (2015). Local government expenditure, economic growth and income inequality in south sulawesi province. *Journal of Applied Economics And Business*, 3(2), 61-73.

Selase, A. E. (2019). Impact of disaggregated public expenditure on unemployment rate of selected African countries: A panel dynamic analysis approach. *American Internasional Journal of Humanities, Art and Social Sciences*, 1(2), 47-57.

Sondakh, G. Y., Lapian, A. L. Ch. P., & Siwu, H. F. D. (2017). Pengaruh belanja modal pemerintah dan investasi swasta terhadap kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi di kota manado tahun 2006-2015. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(01), 146-156.

Sukirno, S. (2000). *Makro Ekonomi Modern,Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sukirno, S. (2008). *Teori Pengantar Makroekonomi* edisi 3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Tambunan, T. (2006). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Gahlia Indonesia.

Widarjono, A. (2007). *Ekonometrika teori dan aplikasi*.Edisi kedua. Yogyakarta: Ekonisia.

Woo, J., Bova, E., Kinda, T., &hang, Y.S. (2017). Distributional consequences of fiscal adjustments: what do the data say ?. *IMF Economic Review*, 65(2), 273-307.

Yusuf, A. A., & Sumner, A. (2015). Growth, Poverty, and Inequality under Jokowi. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51(3), 323-348. doi:10.1080/00074918.2015.1110685

Zulhanafi, Aimon, H., & Syofyan, E. (2013). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas dan tingkat pengangguran di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 2(3), 85-109.